

Manual Indikator Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya

Sasaran Kegiatan

SS. 1 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya Yang Berkualitas

Deskripsi SP

Pengembangan subsektor perikanan budidaya menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi kewilayahan melalui pendayagunaan komoditas perikanan bernilai strategis. Di dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 - 2024, diamanatkan pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis (Major Project), yang salah satunya terkait Revitalisasi Tambak Di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng. Hal ini juga diperkuat dengan arahan Presiden untuk menaikkan produksi dan nilai ekspor udang sebesar 250% pada tahun 2024. Tidak hanya komoditas udang, pada rapat terbatas internal kabinet pada tanggal 23 Juni 2023, Presiden mengamanatkan agar Industri rumput laut nasional juga turut dikembangkan, diakselerasi dan dikelola dengan baik, fokusnya adalah peningkatan produktivitas dari sisi hulu serta peningkatan nilai tambah di sisi hilir. Oleh karena itu, agar kedua target tersebut (percepatan industri udang dan rumput laut) dapat terealisasi, diperlukan aksi konkrit bersama lintas stakeholder, mencakup program perbaikan mutu benih, rehabilitasi dan pengembangan infrastruktur dasar, penataan kawasan, pengembangan inovasi teknologi, pengembangan kapasitas dan peningkatan akses pemasaran. Selain itu perlu dibenahi pula aspek tata kelola, mulai dari pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang sinergis antar sektor, dukungan sistem permodalan, iklim usaha dan investasi yang kondusif, serta penyederhanaan perizinan dan afirmasi kebijakan.

Indikator Kinerja

: Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya yang Ditindaklanjuti

Deskripsi Indikator Kinerja

Definisi:

Terdapat 4 Rumusan Kebijakan pada indikator kebijakan Persentase Rumusan Kebijakan Di Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya Yang Ditindaklanjuti dan berikut adalah deskripsi dari masing-masing rumusan kebijakan tersebut:

1. Deskripsi Rumusan Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang

Rumusan kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang akan berfokus pada upaya koordinasi dan pengendalian program/kebijakan terkait perbaikan praktik usaha pada industri udang nasional mencakup peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem perijinan berusaha, pembentukan tim pengawasan dan penegakan hukum lintas kementerian, revitalisasi irigasi pertambakan rakyat serta penyusunan regulasi yang mengatur baku mutu buangan usaha tambak udang.

2. Deskripsi Rumusan Kebijakan Pengembangan Kluster Budidaya Unggulan

Rumusan kebijakan Pengembangan Kluster Budidaya Unggulan akan berfokus pada upaya koordinasi dan pengendalian program/kebijakan terkait dukungan lintas stakeholder dan mitra pembangunan pada upaya pengembangan pilot project kluster komoditas unggulan berorientasi ekspor khususnya untuk

komoditas Rumput Laut dan Lobster.

3. Deskripsi Rumusan Kebijakan Pengembangan Input Produksi, Sarana dan Tata Kelola Akuakultur

Rumusan kebijakan Pengembangan Input Produksi, Sarana dan Tata Kelola Akuakultur akan berfokus pada upaya koordinasi dan pengendalian program/kebijakan terkait perbaikan tata kelola industri udang dan tilapia dalam negeri. Untuk komoditas udang, perbaikan tata kelola akan berfokus pada peningkatan jumlah pemegang sertifikasi CBIB dan pemenuhan praktik usaha berdasarkan prinsip CBIB, standarisasi terkait tarif/retribusi yang dibebankan kepada pelaku usaha, pemutakhiran kelengkapan ijin usaha, perbaikan kesesuaian zonasi untuk area pertambakan eksisting, serta pengendalian kebijakan terhadap upaya alih fungsi lahan terhadap area pertambakan eksisting. Adapun untuk komoditas Tilapia perbaikan tata kelola yang akan berfokus pada penataan KJA khususnya di wilayah waduk Citarum, Sanguling dan Cirata (sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum).

4. Deskripsi Rumusan Kebijakan Pengembangan Industri Rumput Laut Terintegrasi

Rumusan kebijakan Pengembangan Industri Rumput Laut Terintegrasi akan berfokus pada upaya koordinasi dan pengendalian program/kebijakan terkait pengembangan pilot project budidaya rumput laut skala besar terintegrasi hulu - hilir dengan teknologi mekanisasi, penetapan International Tropical Seaweed Research Center, dan penyusunan draft RanPerpres Akeselerasi Industri Rumput Laut Nasional.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Kertas Kerja Kebijakan yang Ditindaklanjuti (4)}}{\text{Jumlah Kertas Kerja Kebijakan yang Ditetapkan (4)}} \times 100\%$$

Tujuan:

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, pengendalian, dan implementasi kebijakan di Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya

Satuan Pengukuran : Persentase

Unit Penanggung jawab : Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya

Unit/Pihak Penyedia Data :

Unit/Pihak Penyedia Data terkait Rumusan Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Kementerian PUPR
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Investasi
5. Kementerian ATR
6. Bappenas
7. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten
8. Mitra Pembangunan
9. Dunia Usaha

Unit/Pihak Penyedia Data terkait Rumusan Kebijakan Pengembangan Kluster Budidaya Unggulan

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Kementerian PUPR
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Investasi
5. Kementerian ATR

Periode Pelaporan : Triwulan Semesteran Tahunan

Periode Pelaporan	2023		2024
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	25%	25%	25%
TRIWULAN 2	50%	50%	50%
TRIWULAN 3	75%	75%	75%
TRIWULAN 4	100%	100%	100%

Plt. Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya



Cahyadi Rasyid, ST., M.Si.

Manual Indikator Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya

Sasaran Program (SP)

SS. 1 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya Yang Berkualitas

Deskripsi SP

Kebijakan industrialisasi udang nasional merupakan salah satu agenda pemerintah untuk membangun sektor kelautan dan perikanan. Paradigma yang digunakan tidak hanya berfokus pada pencapaian target produksi semata melainkan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan daya saing produk dengan mempertimbangkan potensi daya dukung lingkungan, ekonomi dan sosial. Dalam Major Project revitalisasi kawasan pertambakan di sentra produksi udang dan bandeng (RPJMN 2020 – 2024) telah ditetapkan 5 lokasi prioritas antara lain Lampung, Sulawesi Selatan, Pantai Utara Jawa (Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah) serta Nusa Tenggara Barat.

Industri budidaya rumput laut Nasional merupakan industri yang sangat strategis dan masih memiliki banyak potensi pertumbuhan di masa depan. Di tingkat global, Indonesia merupakan produsen terbesar kedua setelah Tiongkok dengan volume produksi di tahun 2022 mencapai 9,9 Juta Ton. Selain itu, produksi komoditas rumput laut berkontribusi sebesar 65% terhadap produksi akuakultur nasional. Ekspor komoditas rumput laut termasuk dalam 5 besar komoditas ekspor perikanan unggulan dengan nilai ekspor pada tahun 2022 mencapai USD 400 Juta. Saat ini, sekalipun kontribusinya yang relatif besar terhadap sektor perikanan nasional, masih banyak potensi yang belum tergali. Berbagai studi menunjukkan berbagai potensi produk turunan dari rumput laut, di antaranya biostimulant atau pupuk organik, makanan, bioplastic, atau bahkan biofuel. Namun untuk dapat mewujudkan berbagai potensi tersebut, area dan produksi budidaya rumput laut harus ditingkatkan dan biaya untuk budidaya dan pengolahan rumput laut harus dapat diturunkan. Kebijakan kunci yang dibutuhkan salah satunya adalah budidaya skala besar dan penggunaan mekanisasi serta teknologi.

Indikator Kinerja

: Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan

Deskripsi Indikator Kinerja :

Definisi:

Terdapat 1 Isu Strategis dan 1 Isu RB Tematik pada indikator kebijakan Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan dan berikut adalah deskripsi dari masing-masing isu-isu tersebut:

1. Koordinasi Revitalisasi Kawasan Tambak Udang dan Bandeng

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Revitalisasi Kawasan Pertambakan Udang dan Bandeng akan berfokus pada perbaikan tata kelola industri di sisi hulu secara holistik, mencakup kesesuaian zonasi, simplifikasi perizinan, dan kebijakan standarisasi pungutan. Serta koordinasi revitalisasi irigasi pertambakan rakyat

2. Pengembangan Large Scale Seaweed Farming Terintegrasi Hulu – Hilir

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Large Scale Seaweed Farming Terintegrasi Hulu - Hilir akan berfokus pada dukungan fasilitasi peningkatan realisasi investasi sektor kelautan perikanan khususnya

investasi di industri rumput laut, serta monitoring dan evaluasi pilot project large scale seaweed farming eksisting baik dari aspek ekonomi, sosial serta lingkungan, yang tujuannya tidak lain sebagai dasar kebijakan pemerintah di masa mendatang.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Isu Strategis yang Diselesaikan (2)}}{\text{Jumlah Isu Strategis yang ditugaskan (2)}} \times 100\%$$

Tujuan:

Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian isu strategis.

Satuan Pengukuran :

Unit Penanggung jawab :

Unit/Pihak Penyedia Data :

<p>Unit/Pihak Penyedia Data terkait Koordinasi Revitalisasi Kawasan Tambak Udang dan Bandeng</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian PUPR 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Investasi 5. Kementerian ATR 6. Bappenas 7. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten 8. Mitra Pembangunan 9. Dunia Usaha 	<p>Unit/Pihak Penyedia Data terkait Pengembangan Large Scale Seaweed Farming Terintegrasi Hulu – Hilir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian PUPR 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kementerian Investasi 5. Kementerian ATR 6. Bappenas 7. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten 8. Mitra Pembangunan 9. Dunia Usaha
---	---

Sumber Data :

<p>Sumber Data terkait Koordinasi Revitalisasi Kawasan Tambak Udang dan Bandeng</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Capaian Produksi Komoditas Perikanan 2. Data Realisasi Program K/L terkait 3. Notulensi/Surat/Bahan Paparan Rapat Koordinasi dan Tinjauan Lapangan 	<p>Sumber Data terkait Pengembangan Large Scale Seaweed Farming Terintegrasi Hulu – Hilir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Capaian Produksi Komoditas Perikanan 2. Data Realisasi Program K/L terkait 3. Notulensi/Surat/Bahan Paparan Rapat Koordinasi dan Tinjauan Lapangan
---	---

Jenis Konsolidasi Periode : Sum Average Take last

Jenis Konsolidasi Lokasi : Sum Average Raw Data

Polarisasi Indikator Kinerja : Maximize Minimize Stabilize

Periode Pelaporan : Triwulan Semesteran Tahunan

Periode Pelaporan	2023		2024
	Target	Realisasi	Target
TRIWULAN 1	25%	25%	25%
TRIWULAN 2	50%	50%	50%
TRIWULAN 3	75%	75%	75%
TRIWULAN 4	100%	100%	100%

Plt. Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya

Cahyadi Rasyid, ST., M.Si.